



**PARTISIPASI PENGURUS PKK DALAM PEMBERDAYAAN  
KELOMPOK WANITA TANI DI KELURAHAN PLALANGAN  
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG  
SKRIPSI**

Disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

oleh:

**UNNES**  
Fadhilah  
1201413020

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

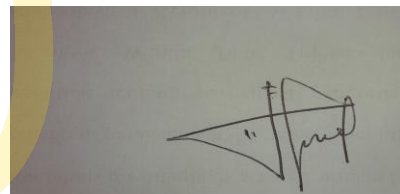
**2017**

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ” **Partisipasi Pengurus PKK dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Di Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang**” dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 24 Mei 2017

Yang membuat pernyataan



Fadhilah  
NIM : 1201413020

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

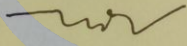
## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Partisipasi Pengurus PKK dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Di Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang" telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada sidang skripsi pada :

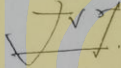
Hari : Selasa  
Tanggal : 09 Mei 2017

Menyetujui

Pembimbing I

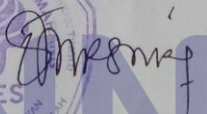
  
Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd  
NIP. 195604271986031001

Pembimbing II

  
Drs. Ilyas, M.Ag  
NIP. 196606011988031003

Mengetahui

a.n. Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah,  
Sekretaris

  
Dr. Tri Suminar, M.Pd  
NIP. 196705261995122001

iii

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

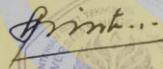
## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

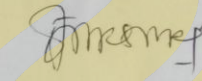
Hari : Rabu  
Tanggal : 24 Mei 2017



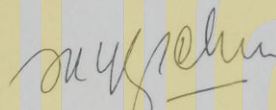
Ketua

  
Dra. Smita Saraswati, M.Pd., Kons  
NIP. 196006081999032001

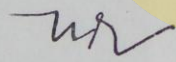
Sekretaris

  
Dr. Tri Suminar, M.Pd  
NIP. 196705261995122001

Penguji Utama

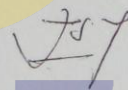
  
Dr. Amin Yusuf, M.Si  
NIP. 196408081991031003

Penguji/Pembimbing I



Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd  
NIP. 195604271986031001

Penguji/Pembimbing II



Drs. Hyas, M.Ag  
NIP. 196606011988031003

**UNNES**  
iv  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

1. Orang kaya yang hidupnya tanpa berbagi, ia akan mati dalam sepi (Abu Huraerah)
2. Sebuah halaman kosong akan menjadi lebih berharga karena torehan tinta kebijaksanaan, begitu pula hidup mu menjadi lebih berarti karena ikhlasnya bakti untuk mengabdikan (Penulis)
3. Putihnya beras bukan karena tumbukan, melainkan karena gesekan antara beras yang satu dengan beras yang lainnya (Penulis)

### PERSEMBAHAN:

1. Bapak Hariyanto, Ibu Sunarni dan keluarga tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, semangat dan doa.
2. Sahabatku Trio Agustina dan teman-teman Kos Diana yang selalu berbagi keceriaan, semangat, bantuan, dan doa.
3. Rony Wicaksono, yang selalu memberikan bantuan, semangat dan doa.
4. Teman-teman PLS angkatan 2013, junjung tinggi almamater.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang senantiasa melimpahkan rizki, rahmat dan hidayah, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul "Partisipasi Pengurus PKK dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Di Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang" dapat diselesaikan dengan baik.

Maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi penyelesaian studi Strata 1 guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

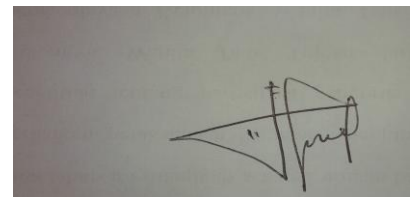
1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian, sekaligus dosen pembimbing I yang sabar memberikan bimbingan, pengarahan, masukan, kemudahan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Dr. Utsman, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan ijin penelitian dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
3. Drs. Ilyas, M.Ag., Dosen Pembimbing II yang sabar memberikan bimbingan, pengarahan, masukan, kemudahan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

4. Sukisno, SH., Lurah Plalangan beserta jajarannya yang memberikan ijin penelitian.
5. Ibu Sutiningsih, ketua PKK Kelurahan Plalangan yang membantu dengan sabar selama penelitian.
6. Ibu Sri Lestariningsih, ketua KWT Bunda Lestari Plalangan yang membantu dengan sabar selama penelitian.
7. Ibu Sri Mulyani, ketua KWT Mulya Sejahtera yang membantu dengan sabar selama penelitian.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pengalaman dan ilmunya bagi penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak telah membantu tersusunnya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat segala keterbatasan, kemampuan, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang memerlukan.

Semarang, 24 Mei 2017

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Fadhilah  
1201413020



## ABSTRAK

Fadhilah. 2017. “**Partisipasi Pengurus PKK dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Di Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang**”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd dan Dosen Pembimbing II : Drs. Ilyas, M.Ag.

**Kata Kunci : Partisipasi, Pemberdayaan, KWT**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebagian besar orang yang memandang bahwa organisasi PKK hanya sebelah mata. Mereka menganggap PKK tidak mampu berkontribusi terhadap pemberdayaan. Padahal ada PKK yang bermutu dan produktif dalam pemberdayaan, mampu memberikan sumbangsih yang besar terhadap pemberdayaan, khususnya dalam memberdayakan wanita untuk mengaktualisasikan potensi diri mereka. Di dalam suatu program pemberdayaan tanpa adanya keterlibatan organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Partisipasi tetap menjadi kebutuhan mendasar terhadap keberhasilan suatu program. KWT di kelurahan Plalangan merupakan organisasi di bawah binaan PKK, namun belum mampu mengembangkan usahanya secara optimal. Permasalahan yang dikaji ialah bagaimana partisipasi pengurus PKK serta faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan KWT di Kelurahan Palangan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendiskripsikan partisipasi pengurus PKK dalam pemberdayaan KWT, (2) mengetahui faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan KWT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber terdiri dari 2 pengurus PKK, 4 pengurus KWT, Lurah, dan 2 perangkat desa. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan : (1) pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data, dan (4) Penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini : (1) partisipasi pengurus PKK dalam pemberdayaan KWT berupa tenaga, sumbangsih pikiran dan barang, (2) faktor penghambat pemberdayaan KWT ialah waktu, usia dan pekerjaan, sedangkan faktor pendukungnya adalah bantuan berupa barang dari berbagai pihak.

Simpulan secara umum dari penelitian ini adalah partisipasi pengurus PKK dalam pemberdayaan KWT mulai dari tahap kesadaran sampai tahap transformasi berupa pikiran, tenaga dan barang, sedangkan pada tahap pengayaan tidak dilakukan. Saran secara umum yang disampaikan adalah partisipasi pengurus PKK, aparat desa maupun masyarakat hendaknya bersinergi dalam memberdayakan KWT agar mampu meningkatkan taraf hidup KWT pada khususnya dan masyarakat secara umum.



# DAFTAR ISI

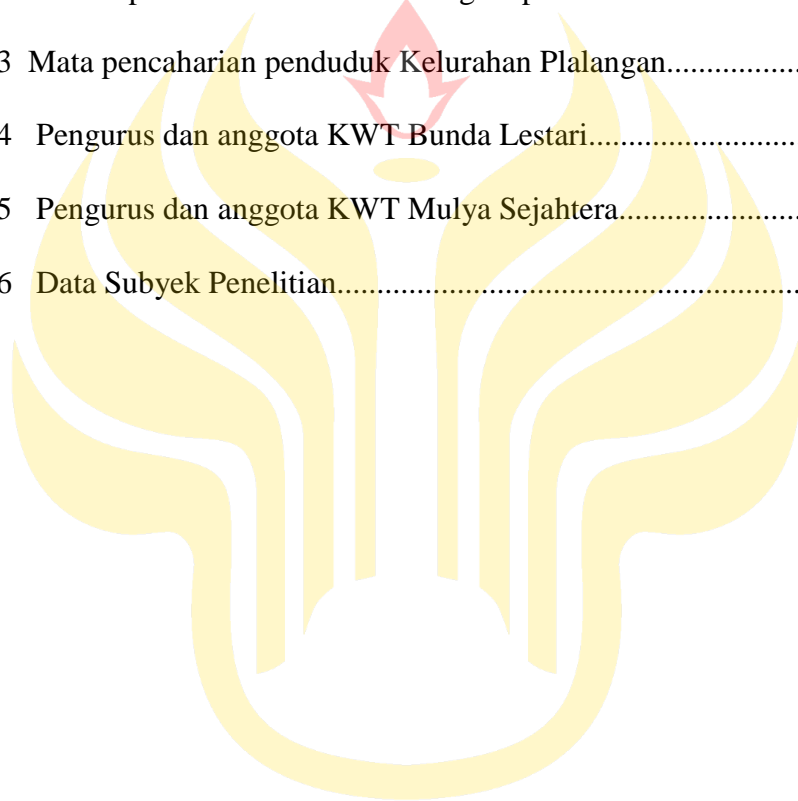
	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Penegasan Istilah .....	10
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Partisipasi .....	12
2.1.1 Pengertian Partisipasi .....	12
2.1.2 Tujuan dan Manfaat Partisipasi.....	15
2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi .....	18
2.2 Pengurus PKK.....	20
2.2.1 Pengertian Pengurus PKK.....	20
2.2.2 Visi dan Misi PKK.....	22
2.2.3 Sasaran Gerakan PKK.....	23
2.2.4 Program Gerakan PKK.....	24
2.3 Pemberdayaan.....	29
2.3.1 Pengertian Pemberdayaan.....	29

2.3.2	Tujuan Pemberdayaan.....	33
2.3.3	Strategi Pemberdayaan.....	34
2.3.4	Pendekatan Pemberdayaan.....	36
2.3.5	Model Pemberdayaan.....	37
2.3.6	Tahap-tahap Pemberdayaan.....	40
2.3.7	Proses Pemberdayaan.....	42
2.3.8	Hambatan Pemberdayaan.....	46
2.4	Kelompok Wanita tani.....	47
2.4.1	Pengertian Kelompok.....	47
2.4.2	Pengertian Kelompok Wanita Tani.....	48
2.5	Kerangka Berfikir.....	50
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Pendekatan Penelitian .....	52
3.2	Lokasi Penelitian.....	53
3.3	Fokus Penelitian.....	53
3.4	Subyek Penelitian.....	54
3.5	Sumber Data Penelitian.....	54
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.7	Keabsahan Data .....	57
3.8	Analisis Data .....	59
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Hasil Penelitian .....	63
4.1.1	Deskripsi Umum Daerah Penelitian.....	63
4.1.1.1	Lokasi Penelitian.....	63
4.1.1.2	Keadaan Alam.....	63
4.1.1.3	Keadaan Geografis .....	64
4.1.1.4	Kependudukan.....	64
4.1.1.5	Struktur Organisasi.....	65
4.1.2	Aspek Kehidupan Masyarakat Plalangan.....	65
4.1.2.1	Kondisi Sosial Budaya.....	65
4.1.2.2	Kondisi Sosial Ekonomi.....	66

4.1.3	Profil PKK Kelurahan Plalangan.....	67
4.1.3.1	Struktur Organisasi.....	68
4.1.4	Profil KWT Kelurahan Plalangan.....	68
4.1.4.1	Profil KWT Bunda Lestari .....	68
4.1.4.2	Profil KWT Mulya Sejahtera .....	71
4.1.5	Gambaran Subyek Penelitian.....	74
4.1.6	Partisipasi Pengurus PKK.....	76
4.1.7	Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung.....	89
4.2	Pembahasan.....	95
4.2.1	Partisipasi Pengurus PKK.....	95
4.2.2	Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung.....	101
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1	Simpulan .....	105
5.2	Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	107
<b>LAMPIRAN</b>	.....	111

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Jumlah penduduk berdasarkan usia.....	64
Tabel 2 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan .....	66
Tabel 3 Mata pencaharian penduduk Kelurahan Plalangan.....	67
Tabel 4 Pengurus dan anggota KWT Bunda Lestari.....	69
Tabel 5 Pengurus dan anggota KWT Mulya Sejahtera.....	72
Tabel 6 Data Subyek Penelitian.....	75



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1 Kerangka berfikir.....	51
Gambar 2 Langkah-langkah verifikasi.....	62
Gambar 3 Struktur organisasi kelurahan Plalangan.....	65
Gambar 4 Struktur organisasi PKK.....	68
Gambar 5 Struktur organisasi KWT Bunda Lestari.....	70
Gambar 6 Struktur organisasi KWT Mulya Sejahtera.....	73

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 : Pedoman Observasi .....	112
Lampiran 2 : Kisi-kisi Pedoman Wawancara.....	114
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara .....	119
Lampiran 4 : Hasil Observasi.....	131
Lampiran 5 : Hasil Wawancara.....	134
Lampiran 6 : Catatan Lapangan .....	195
Lampiran 7 : Dokumentasi Gambar .....	211
Lampiran 8 : Surat Ijin Permohonan Penelitian.....	213
Lampiran 9 : Surat Keterangan Penelitian dari Kelurahan Plalangan.....	214

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peningkatan kualitas wanita melalui program pemberdayaan yang diarahkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada pada diri wanita. Berdasarkan sisi programnya, PKK pada awalnya diarahkan untuk mendorong kemajuan wanita agar dapat memainkan peran gandanya secara baik, yaitu sebagai pengelola keluarga, pencari nafkah dan pelaku pembangunan. Namun, sesuai dengan perkembangannya, program pemberdayaan wanita kemudian diarahkan untuk mewujudkan sejajar antara pria dan wanita dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sasarannya ditujukan untuk mengembangkan dirinya agar dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama terhadap sumber pembangunan.

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan dalam mendukung program-program pemerintah. Berawal dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Maka dari itu, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolak ukur dan barometer dalam pembangunan dengan program-program pemerintah. PKK menjadi gerakan



beberapa aspek yang diperlukan seperti data warga, ibu hamil dan balita, kelahiran, kematian, sampai kegiatan masyarakat.

PKK yang merekrut anggota sampai lapisan bawah dengan cara mengajak ibu rumah tangga yang ingin bergabung dan menjadi pengurus organisasi PKK. Masyarakat diharapkan mampu membawa pada kondisi keluarga yang sejahtera, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia baik secara material, sosial, mental dan spiritual serta keluarga yang berdaya yaitu keluarga yang hidup sejahtera, maju dan mandiri. Adanya PKK diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan wanita. Pemberdayaan wanita merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran agar dapat melaksanakan fungsinya.

Namun pada kenyataannya sebagian besar orang memandang organisasi PKK hanya sebelah mata. Mereka menganggap PKK tidak mampu berkontribusi terhadap pembangunan. Banyak PKK yang bermutu dan produktif dalam membantu pembangunan, mampu memberikan sumbangsih yang besar terhadap pemberdayaan, khususnya dalam merekrut kaum wanita untuk mengaktualisasikan potensi diri mereka masing-masing. Di dalam suatu program pemberdayaan tanpa adanya keterlibatan organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Partisipasi tetap menjadi kebutuhan mendasar terhadap keberhasilan suatu program.

Kogoya dalam jurnal yang berjudul “Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa di Kabupaten Lanny Jaya Papua” mengemukakan bahwa:

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa terbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemeliharaan. Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan terdiri atas sumbangan tenaga, dana dan material. Bentuk partisipasi

masyarakat yang terbesar adalah bentuk sumbangan tenaga yang mencapai 77%, kemudian diikuti oleh sumbangan material 18%, tanah dan tanam tumbuh 3%, serta yang terkecil berbentuk sumbangan dana yaitu sebesar 2%. Tingkat Partisipasi masyarakat pada tahap pemeliharaan terdiri atas tenaga, uang dan tidak memberikan partisipasi. Bentuk partisipasi terbesar yaitu tenaga dengan persentasi 46,29%. Adanya partisipasi tersebut mampu mendorong pembangunan desa lebih maju.

Salah satu usaha pemerintah dalam mewadahi kegiatan perempuan yaitu melalui Kelompok Wanita Tani (KWT). Adapun tujuan dibentuknya KWT adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petani dan keluarganya sebagai subjek pembangunan pertanian melalui pendekatan kelompok agar lebih berperan dalam pembangunan. Kelompok tani merupakan suatu bentuk perkumpulan petani yang berfungsi sebagai media penyuluhan yang diharapkan lebih terarah dalam perubahan aktivitas usaha tani yang lebih baik.

Aktivitas usaha tani yang lebih baik dapat dilihat dari adanya peningkatan-peningkatan dalam produktivitas usaha tani yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani sehingga akan mendukung terciptanya kesejahteraan yang lebih baik bagi petani dan keluarganya. Diciptakan wadah bagi perempuan Indonesia dan telah digariskan bentuk-bentuk peran perempuan dalam pembangunan, maka pemerintah mengharapkan peran perempuan Indonesia dalam pembangunan dapat meningkat. Wanita bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga pada dunia pertanian, tetapi banyak wanita yang ikut berperan atau memberi kontribusi nyata.

Kenyataannya sekitar 50 persen wanita tani di samping bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, mereka juga bekerja di ladang atau di sawah bahkan mereka membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan mengikuti KWT. Hal ini

dilakukan karena mereka berharap dengan adanya peran atau keterlibatan wanita tani, jumlah produktivitas usaha akan meningkat. Wanita memegang peran penting sebagai ibu rumah tangga dengan berbagai jenis pekerjaan dari yang berat sampai yang ringan, seperti mengatur rumah tangga, memasak, mencuci, mengasuh dan mendidik anak. Namun sejalan dengan perkembangan teknologi di sektor pertanian, maka perempuan tani perlu meningkatkan pengetahuan, keterampilan sehingga dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari segala jenis sumber daya yang ada di sekitarnya berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Karena itu, kemajuan yang dicapai perempuan zaman sekarang dapat dijumpai pada kaum hawa ini sebagai motor penggerak pembangunan dibidang pertanian, seperti kelompok tani, dalam kegiatan program peningkatan produksi pertanian.

Kebanyakan orang memandang perempuan hanya sebelah mata. Ia memiliki persepsi bahwasannya seorang perempuan tidak mampu berkontribusi di dalam keluarga. Secara ekonomis, orang memandang perempuan tidak mampu berpenghasilan dan tidak produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Kebanyakan orang memiliki *mindshet*, seorang perempuan hanya bergantung pada penghasilan seorang laki-laki. Padahal, tidak semua perempuan di desa lingkup aktivitasnya hanya di rumah saja. Ia mampu berdaya, aktif dan produktif serta inovatif dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Secara normatif, kedudukan wanita dan pria adalah sejajar. Akan tetapi, dalam kehidupan nyata yang lazim disebut dengan istilah *gender stratification* yang menempatkan status wanita dalam tatanan hierarki pada posisi subordinat atau tidak persis sejajar dengan posisi kaum pria. Tatanan hierarki demikian antara lain

ditandai oleh kesenjangan ekonomi (perbedaan akses pada sumber-sumber ekonomi) dan sekaligus kesenjangan politik (perbedaan akses pada peran politik). Dibandingkan dengan wanita, pria memperoleh akses yang lebih besar kepada sumber-sumber ekonomi dan politik. Secara ekonomis, pria lebih banyak mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan daripada wanita. Sedangkan secara politis, pria lebih banyak menempati posisi paling atas dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perjuangan wanita untuk mencapai puncak strata sosial lebih berat. Tentu saja, kecenderungan semacam itu melekat pada masyarakat yang berada di pedesaan.

Sejak zaman Hindia Belanda, Raden Ajeng Kartini sudah memelopori perlunya kebangkitan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, serta kehidupan berbangsa dan negara. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sejajar dengan kaum laki-laki. Namun hingga era teknologi informasi dan komunikasi sekarang, peran perempuan terutama di kalangan keluarga pedesaan masih terkesan termajinalkan. Pekerjaan perempuan masih terbatas pada mengurus rumah tangga seperti memasak di dapur, mencuci dan kegiatan rumah tangga lainnya.

Terbatasnya peran perempuan menurut Suyono (2010) dalam Anwas (2014: 150), realitas dalam masyarakat atau keluarga pedesaan biasanya sumber penghasilan keluarga mengandalkan suami. Peran istri terbatas mengurus anak atau rumah tangga di rumah. Padahal keluarga kurang beruntung itu umumnya berpendidikan rendah. Keterampilan juga rendah. Kondisi ini semakin tidak berdaya akibat mereka tidak memiliki modal usaha apalagi jaringan (*networking*)

untuk mengembangkan usaha ekonomi keluarganya. Supaya mampu mendongkrak keterpurukan keluarga-keluarga seperti ini sangat perlu peranserta perempuan. Para istrindari keluarga pedesaan perlu diberdayakan untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah.

Widjajanti dalam jurnal ekonomi pembangunan mengemukakan bahwa:

”semakin tinggi proses pemberdayaan akan dapat menciptakan keberdayaan masyarakat, bahwa pemberdayaan menginginkan pengembangan modal manusia, dan akan lebih baik lagi jika pemberdayaan didukung oleh pengembangan kemampuan pelaku pemberdayaan.

Kelurahan Plalangan merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Gunungpati, yang terdiri dari 6 RW. Berdasarkan observasi peneliti, kelurahan Plalangan terkenal dengan hasil pertaniannya, berupa singkong, tanaman obat keluarga, tanaman hias, sayuran dan buah-buahan (pisang, nangka, durian, rambutan). Hal ini merupakan potensi alam yang terdapat di kelurahan Plalangan. Potensi alam tersebut sebagian besar dikelola oleh KWT. Pada saat ini program yang akan dikembangkan yaitu kebun herbal dan pelatihan pembuatan bibit buah.

PKK di kelurahan Plalangan merupakan organisasi yang aktif dan berkembang dibandingkan dengan PKK di kelurahan lainnya yang ada di kecamatan Gunungpati. Hal ini terbukti dengan program-program PKK yang dilaksanakan mampu meraih juara se-Kecamatan Gunungpati. Program-program tersebut terdiri ekonomi produktif, bank sampah, kampung tela, Lingkungan Bersih Sehat (LBS), penyuluhan jentik-jentik nyamuk di setiap rumah warga, koperasi, penyuluhan kenakalan remaja, posyandu dan KWT. Namun pada sekian program

tersebut yang belum mampu berkembang yaitu KWT. PKK Kelurahan Plalangan menaungi dua kelompok KWT, yakni KWT Bunda Lestari dan Mulya Sejahtera.

Sebagian besar ibu-ibu rumah tangga yang terdapat di kelurahan Plalangan belum tertarik bergabung dalam KWT. Ia lebih mengutamakan kesibukannya masing-masing. Oleh karena itu, PKK suatu motor penggerak bagi ibu-ibu rumah tangga sudah semestinya menjadi tugas dan tanggungjawab untuk memberdayakan ibu-ibu rumah tangga, khususnya ibu-ibu yang bergabung di KWT. Keterlibatan PKK dalam program ini harus lebih intens dan dominan.

Selain itu, berdasarkan observasi peneliti modal dan fasilitas yang terdapat di KWT yang seharusnya dibutuhkan belum memadai. Oleh karena itu, keterlibatan PKK sebagai motor penggerak bagi kaum wanita hendaknya mampu mengembangkan agar dapat meningkatkan taraf hidup KWT pada khususnya dan masyarakat secara umum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Partisipasi Pengurus PKK dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana partisipasi pengurus PKK dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?
- 1.2.2 Apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1.3.1 Mendiskripsikan partisipasi pengurus PKK dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
- 1.3.2 Mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.



## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis.

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan nonformal untuk memperkuat gambaran yang jelas mengenai partisipasi anggota PKK dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani serta sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya dalam kajian pendidikan nonformal yang menyangkut tentang partisipasi pengurus PKK dalam pemberdayaan.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Jurusan PLS, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah di bidang pendidikan nonformal khususnya tentang partisipasi anggota PKK dalam pemberdayaan.

1.4.2.2 Bagi PKK, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan serta dijadikan bahan pertimbangan untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan.

1.4.2.3 Bagi pemerintah, sebagai acuan dalam menentukan kebijakan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan.

## 1.5 Penegasan Istilah

Maksud penegasan istilah adalah untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman atau kemungkinan salah tafsir. Oleh sebab itu diadakan penegasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Hal-hal yang perlu dijelaskan adalah:

### 1.5.1 Partisipasi

Partisipasi yaitu turut serta seseorang atau masyarakat dalam membuat suatu program mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, yang mana partisipasi tersebut berupa harta benda, tenaga dan sumbangsih ide atau gagasan.

### 1.5.2 Pengurus PKK

Pengurus PKK merupakan seseorang yang diberi kepercayaan dan kewenangan untuk memimpin anggotanya yang bertujuan untuk membina dan membangun keluarga dibidang mental, spiritual dan fisik serta peningkatan mutu pangan, sandang, kesehatan, dan lingkungan hidup.

### 1.5.3 Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah serangkaian proses secara bertahap masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia di lingkungan sekitarnya, dengan cara pemberian motivasi, energi, pengetahuan dan keterampilan agar masyarakat menjadi lebih mandiri dan mampu untuk mengelola potensi tersebut, sehingga dapat mensejahterakan hidup masyarakat itu sendiri.

#### 1.5.4 Kelompok Wanita Tani

Kelompok Wanita Tani (KWT) adalah kumpulan para wanita yang mempunyai aktivitas di bidang pertanian yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## BAB 2

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Partisipasi

##### 2.1.1 Pengertian Partisipasi

Menurut Syahyuti (2005: 1), partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap hubungan di antara *stakeholder* yang berada di dalam masyarakat (kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga jasa lain). Partisipasi dapat didefinisikan sebagai proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh pembangunan. Menurut Winardi (Syarifur Rohman, 2008: 13), partisipasi adalah turut wewenang baik secara mental dan emosional memberikan sumbangsih kepada proses pembuatan dimana keterlibatan secara pribadi orang yang bersangkutan untuk melaksanakan tanggungjawabnya.

Partisipasi atau peran serta adalah serangkaian proses dimana masyarakat lokal dilibatkan dan berperan dalam isu yang berhubungan dengan mereka, sampai dimana kekuasaan dibagi dalam pengambilan keputusan, tergantung jenis partisipasi tersebut Kelly (Adiyoso, 2009: 44). Partisipasi menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Firmansyah (2009), menyatakan ada beberapa bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi representatif. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk sumbangan harta benda, biasanya berupa peralatan kerja dan perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat yang membutuhkan, dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Keith Davis (1985: 177) dalam Kamil (2007: 94), mengemukakan bahwa:

*“participation is mental and emotional of person in group situations that encourage them to contribute to group goals and share responsibility for them”*

Tiga aspek yang dapat ditarik dari definisi di atas adalah, pertama keterlibatan emosi dan mental warga belajar. Partisipasi warga belajar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam suatu program, berarti melibatkan emosi dan mental warga belajar daripada kegiatan fisik. Kedua, motivasi warga belajar untuk berkontribusi dalam suatu program. Suatu program, motivasi warga belajar untuk menyumbangkan ide-ide kreatif dan membangun merupakan aspek khusus yang dapat membantu keberhasilan dalam suatu program. Ketiga, partisipasi warga belajar dalam suatu program, berarti memberikan sebagian tanggungjawab keberhasilan program tersebut.

Mikkelsen (1999) dalam Suryana (2010: 90), mengemukakan enam pengertian partisipasi di antaranya: pertama, partisipasi dalam pengertian sukarela dari masyarakat tanpa ikut serta dalam pengambilan kesimpulan. Kedua, partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan. Ketiga, partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait dan kebebasan untuk mengambil keputusan. Keempat, partisipasi adalah pemantapan dialog. Kelima, partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. Keenam, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Kusnadi (2005: 94), dimensi partisipasi dibedakan menjadi: (a) berdasarkan sifatnya, dipaksakan dan sukarela, (b) berdasarkan bentuknya, formal dan informal, (c) berdasarkan pelaksanaannya, langsung dan tidak langsung, (d) berdasarkan kepentingannya, kontributif dan insentif. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, partisipasi yaitu turut serta seseorang atau masyarakat dalam membuat suatu program mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, yang mana partisipasi tersebut berupa harta benda, tenaga dan sumbangsih ide atau gagasan.

### 2.1.2 Tujuan dan Manfaat Partisipasi

Tujuan partisipasi masyarakat dapat berubah setiap waktu berdasarkan lingkungannya. Menurut Kelly (Adiyoso, 2009: 46), awalnya partisipasi bertujuan untuk memberi kekuasaan kepada masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan di negara berkembang. Sebelum kegiatan partisipasi dilaksanakan, maka perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana mengenai alasan keikutsertaan terlibat, sasaran kinerja yang dituju, hasil partisipasi, jenis dan bentuk kerangka kerja secara menyeluruh. Tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan.

Menurut Susetiawan (1994: 154-155) dalam Huraerah (2011: 118-119), mengutarakan tujuan partisipasi. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan timbul rasa saling memiliki terhadap program tersebut. Ketiga, mendorong adanya partisipasi umum di berbagai negara, karena timbul anggapan merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.



Suryana (2010: 98), mengemukakan dua tujuan partisipasi, di antaranya: (1) tujuan praktis (tujuan jangka pendek) adalah menyelenggarakan kegiatan bersama masyarakat untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan praktis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai sarana proses belajar dan (2) tujuan strategis (tujuan jangka panjang), adalah untuk memberdayakan masyarakat dan perubahan sosial serta meningkatkan standar dan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan masyarakat dengan menggunakan pendekatan pembelajaran.

Manfaat partisipasi masyarakat bahwa dalam sistem yang demokratis, keputusan-keputusan itu akan sah jika semua yang berkepentingan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Melibatkan publik secara luas dalam pengambilan keputusan dapat mendorong masyarakat untuk merasa memiliki terhadap suatu program. Partisipasi yang utama yakni melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan karena pengetahuan lokal dapat memberikan kontribusi besar dalam perumusan keputusan publik, yakni mengenai masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya.

Partisipasi adalah hak dasar manusia, dengannya keputusan apapun yang menyangkut nasib dan masa depan masyarakat dapat dibuat bersama. Disimpulkan tujuan dan manfaat partisipasi adalah meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah; sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang program pembangunan; meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat; meningkatkan pengetahuan dan keterampilan; meningkatkan hubungan antar masyarakat; meminimalisasi konflik antar individu atau kelompok dalam masyarakat; menjamin keberlanjutan suatu program dan keberhasilan serta pemeliharaan keberhasilan

program; meningkatkan posisi tawar baik dalam politik dan ekonomi terhadap lembaga atau institusi diluar desa termasuk pemerintah dan meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Adiyoso, 2009: 49).

Mengukur partisipasi masyarakat menurut Ife dan Tesoriero (2008) dalam Anwas (2014: 97-98), dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif dalam mengukur partisipasi mencakup: (a) perubahan-perubahan positif dalam layanan lokal, (b) jumlah pertemuan dan jumlah peserta, (c) proporsi berbagai bagian dari kehadiran masyarakat, (d) jumlah orang yang dipengaruhi oleh isu yang diurus, (e) jumlah pemimpin lokal yang memegang peranan, (f) jumlah warga lokal yang memegang peran dalam proyek, (g) jumlah warga lokal dalam berbagai aspek proyek dan pada waktu yang berbeda-beda.

Semakin tinggi skor dari indikator-indikator tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara kuantitatif partisipasi masyarakat juga tinggi, begitu pula sebaliknya. Secara kualitatif, indikator dalam mengukur partisipasi masyarakat mencakup: (a) suatu kapasitas masyarakat yang tumbuh untuk mengorganisasi aksi, (b) dukungan yang tumbuh dalam masyarakat dan jaringan yang bertambah kuat, (c) peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal seperti keuangan dan manajemen proyek, (d) peningkatan kemampuan dari mereka yang berpartisipasi dalam mengubah keputusan menjadi aksi, (f) meningkatnya jangkauan partisipasi melebihi proyek untuk mewakilinya dalam organisasi-organisasi lain, (g) pemimpin-pemimpin yang muncul dari masyarakat, (h) meningkatnya jaringan

dengan proyek-proyek, masyarakat dan organisasi lainnya, (i) mulai mempengaruhi kebijakan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para ahli, partisipasi yaitu melibatkan langsung seluruh pihak yang terkait yakni masyarakat dalam suatu program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga menumbuhkan rasa saling memiliki di antara penyelenggara program dengan masyarakat.

### **2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Perilaku seseorang terhadap suatu objek diwujudkan dengan kegiatan partisipasi, keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Santoso (1999) dalam Soetomo (2008: 66), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang meliputi dua hal, antara lain:

- a. Faktor internal dari individu yang mencakup ciri-ciri atau karakteristik individu yang meliputi: umur, pendidikan, luas lahan garapan, pendapatan, pengalaman berusaha dan kosmopolitan.
- b. Faktor eksternal merupakan faktor di luar karakteristik individu yang meliputi hubungan antara pengelola dengan petani penggarap, kebutuhan masyarakat, pelayanan pengella dan kegiatan penyuluhan.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan ataupun program pemberdayaan, faktor-faktor tersebut dapat mendukung pelaksanaan program dan menghambat pelaksanaan program. Adisasmita (2006: 134) mengatakan ada beberapa faktor

pendukung dan penghambat dalam partisipatif pembangunan pedesaan di antaranya: Faktor-faktor pendukung meliputi: (1) Komitmen anggota masyarakat terhadap pembangunan partisipatif adalah kuat, rasa kebersamaan, kesadaran, dan keikhlasan anggota masyarakat yang tinggi, (2) Sarana untuk menunjang pembangunan pembangunan partisipatif (tenaga, dana dan bahan), dan (3) Program kegiatan pembangunan partisipatif adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Faktor penghambat meliputi: (1) Sosialisasi pentingnya mengenai kegiatan partisipatif belum dilakukan kepada seluruh kelompok masyarakat, (2) Koordinasi kegiatan pembangunan partisipatif belum dilaksanakan secara positif, (3) Perumusan program dan kegiatan pembangunan partisipatif lebih merupakan daftar keinginan, bukan merupakan program dan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Menurut Agus (2011: 87-90) dalam penelitiannya tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, antara lain: keinginan mengikuti program pemberdayaan, pendidikan warga masyarakat, lamanya masyarakat menempati daerah tersebut, pekerjaan masyarakat, penghasilan masyarakat, peran serta pemerintah daerah. Penggunaan model partisipasi juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi.

Menurut Karianga (2011: 233-240) bahwa partisipasi dengan menggunakan model Clear berpendapat bahwa partisipasi akan sangat efektif dimana warga negara: (1) *Can Do* (mampu) dimana masyarakat memiliki sumberdaya dan pengetahuan untuk berpartisipasi, (2) *Like To* (Ingin) dimana masyarakat merasakan

sebagai bagian yang memperkuat partisipasi, (3) *Enabled To* (dimungkinkan) dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, (4) *Asked To* (diminta) dimana masyarakat dimobilisasi melalui lembaga-lembaga publik dan saluran warga, (5) *Responded To* (menanggapi) dimana masyarakat dapat melihat bukti bahwa pandangan mereka telah dipertimbangkan.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu keinginan, motivasi, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu peran serta pemerintah daerah dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## **2.2 Pengurus PKK**

### **2.2.1 Pengertian Pengurus PKK**

PKK semula merupakan akronim dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang bertujuan untuk melibatkan partisipasi wanita melalui program pendidikan perempuan. Kemudian, pada tanggal 27 Desember 1972 organisasi tersebut berubah nama menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang bertujuan untuk membina dan membangun keluarga dibidang mental, spiritual dan fisik serta peningkatan mutu pangan, sandang, kesehatan, dan lingkungan hidup. Anggotanya adalah tokoh/pemuka masyarakat, para isteri Kepala Dinas/Jawatan dan isteri Kepala Daerah sampai dengan tingkat Desa dan Kelurahan yang kegiatannya

didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (*Sumber: Buku Petunjuk Teknis Program PKK Kelurahan Plalangan*).

Selanjutnya dengan adanya reformasi serta paradigma baru dan semangat otonomi daerah, sejak tahun 1999 akronim PKK berubah lagi menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Kata pemberdayaan dipilih karena mengandung pengertian suatu usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan *gender* dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK merupakan wadah untuk membina keluarga bermasyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan yang dapat menghasilkan sinergi untuk keluarga sejahtera yang mandiri dengan meningkatkan mental spiritual perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila.

Dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan berbagai upaya atau usaha dan kegiatan, seperti meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, ikut mengupayakan dalam kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung. Melakukan kegiatan tersebut perlu adanya pengelolaan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-program, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat (Sutedjo, 2006: 3).

Adanya kegiatan PKK diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan keluarga pada umumnya yang berpedoman pada pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok

PKK. Selain memiliki program-program pokok, PKK juga memiliki panca dharma PKK. Isi dari panca dharma ini tentang peranan-peranan wanita dalam kehidupan, yaitu sebagai berikut: a) wanita sebagai pendamping suami, b) wanita sebagai pengelola rumah tangga, c) wanita sebagai penerus keturunan dan pendidik anak, d) wanita sebagai pencari nafkah tambahan, e) wanita sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

### 2.2.2 Visi dan Misi PKK

#### a. Visi

Terwujudnya keluarga beriman yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak muliadan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, mandiri berkesetaraan dan berkeadilan *gender* serta sadar hukum dan lingkungan.

#### b. Misi

- 1) Meningkatnya mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan dan kewajiban Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotong royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi, seimbang.
- 2) Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta peningkatan pemanfaatan pekarangan, sandang dan penataan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.



- 4) Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupannya dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
- 5) Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan perorganisasian maupun pelaksanaan program yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

### **2.2.3 Sasaran Gerakan PKK**

Sasaran gerakan PKK adalah keluarga, baik dipedesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kepribadiannya dalam bidang:

- 1) Mental spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Fisik material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan kesempatan kerja yang layak serta hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan pengetahuan dan keterampilan.

### **2.2.4 Program Gerakan PKK**

Sepuluh program pokok PKK yaitu: penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, papan, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat. Kelompok kerja

(POKJA) sebagai pelaksana program dan kegiatan PKK secara terpadu dilaksanakan oleh pokja-pokja dengan berpedoman pada 10 program pokok PKK.

a. Pokja I sebagai pelaksana kegiatan program:

(1) Penghayatan dan pengamalan Pancasila

Penghayatan dan pengamalan Pancasila dengan menumbuhkan ketahanan keluarga melalui kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilaksanakan pemahaman secara terpadu. Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) mencakup limaunsur yaitu kecintaan tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan atas Pancasila, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara. Kesadaran Hukum (KADARKUM) adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan diprioritaskan di PKK untuk pencegahan KDRT, *trafficking*, perlindungan anak, narkoba. Pola asuh anak remaja untuk menumbuhkan dan membangun perilaku, budi pekerti, sopan santun di dalam keluarga sesuai budaya bangsa begitu juga dengan pemahaman dan keterampilan (*life skill and parenting skill*) diupayakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba.

(2) Gotong rotong

Gotong royong dilaksanakan dengan membangun kerjasama yang baik, menumbuhkan kesadaran, kesetiakawanan sosial, bertenggang rasa, kebersamaan menghormati antar umat beragama antar sesama keluarga, warga, kelompok untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan. Memberdayakan lanjut usia agar dapat menjaga kesehatan fisik dan mental,

kebugaran, keterampilan agar dapat melaksanakan kegiatan secara produktif dan menjadi teladan bagi keluarga dan lingkungannya serta berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan bakti, kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TTMD).

b) Pokja II sebagai pelaksana program

(1) Pendidikan dan keterampilan

Pendidikan dan keterampilan mempunyai prioritas program meningkatkan kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan keluarga yang mempunyai anak balita mengenai tumbuh kembang anak balita secara optimal sebagaimana melaksanakan dan mengembangkan kegiatan program Bina Keluarga Balita (BKB). Meningkatkan mutu dan jumlah pelatihan PKK dengan mengadakan pelatih/*Training of trainer* (TOT). Meningkatkan pengetahuan TP PKK dalam kegiatan Pos PAUD melalui kegiatan PAUD yang diintegrasikan dengan BKB dan Posyandu dengan pertemanan mitra PAUD bekerja sama dengan pokja IV dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kader dalam mendidik anak usia dini. Meningkatkan kejar paket A, B dan C dengan penyuluhan wajib belajar pendidikan sembilan tahun dan pengembangan Keaksaraan Fungsional (KF) dan membudidayakan minat baca melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) bekerja sama dengan instansi terkait.

(3) Pengembangan kehidupan berkoperasi

Prioritas program kehidupan berkoperasi dengan meningkatkan kelompok dan kualitas Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) selain menumbuhkan kesadaran serta kemampuan berwirausaha keluarga juga sebagai

usaha menciptakan dan memperluas lapangan kerja. UP2K PKK dengan memanfaatkan koperasi sebagai salah satu upaya perbaikan ekonomi keluarga dan mendorong terbentuknya koperasi yang dikelola oleh PKK.

c) Pokja III sebagai pelaksana kegiatan program:

(1) Pangan

Prioritas program pangan dengan mewujudkan ketahanan pangan keluarga melalui penganeekaragaman pangan dengan pola pangan 3B (beragam, bergizi, berimbang) sesuai potensi daerah. Mengoptimalkan Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (HATINYA PKK) dengan tanaman pangan dan tanaman produktif, minimal untuk memenuhi keperluan keluarga dan tabungan serta meningkatkan Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TGG) untuk menunjang usaha agrobisnis, hortikultura, tanaman buah, perikanan, peternakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dalam mencapai taraf hidup dan kesejahteraan keluarga.

(2) Sandang

Proritas program sandang yaitu mengupayakan hak paten untuk melindungi hak cipta desain dan mengupayakan keikutsertaan dalam pameran dan lomba baik tingkat lokal, nasional dan internasional. Mengadakan kerja sama dengan para desainer, pengusaha, industri sandang, pariwisata dan membudidayakan perilaku berbusana sesuai dengan moral budaya Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat mencintai produksi dalam negeri.

(3) Perumahan dan tata laksana rumah tangga

Menumbuh kembangkan kembali Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) melalui pemugaran rumah layak huni terutama keluarga miskin dan pengungsi dengan asas Tri Bina (bina usaha, bina manusia dan bina lingkungan), gotong royong serta mengupayakan bantuan dari instansi/dinas terkait, bank, swasta dan masyarakat.

d) Pokja IV sebagai pelaksana kegiatan program:

(1) Kesehatan

Kesehatan merupakan proiritas utama keluarga dengan memantapkan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) dalam upaya menurunkan prefalensi anak balita kurang gizi, gizi seimbang untuk ibu hamil, ibu menyusui dengan pemberian suplemen zat gizi, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama enam (6) bulan, Makanan Pendamping (MP ASI) dan pemberian makanan tambahan bagi balita, lansia di posyandu, menjadikan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai kebiasaan sehari-hari dengan cuci tangan pakai sabun, menggunting kuku dan optimalisasi posyandu.

(2) Kelestarian Lingkungan Hidup

Lingkungan bersih dan sehat dengan menanamkan kesadaran tentang kebersihan pengelolaan kamar mandi dan jamban keluarga, Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL). Menanamkan kebiasaan sampah organik dan non organik serta bahan berbahaya dan beracun untuk didaur ulang selajutnnya ditempat yang benar. Kelestarian lingkungan hidup dengan pengembangan kualitas lingkungan dan pemukiman, kebersihan dan kesehatan, pada pemukiman yang padat dalam rangka terwujudnya kota bersih dan sehat (*Healt cities*) serta

pencegahan banjir dengan tidak menebang pohon sembarangan karena pohon sebagai paru-paru kota.

#### (4) Perencanaan Sehat

Meningkatkan kegiatan dalam program perencanaan sehat dengan meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya pemahaman dan kesertaan dalam program keluarga berencana dan berorientasi pada masa depan dengan cara menabung serta mengatur keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran keuangan keluarga. Meningkatkan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin.

e) Kegiatan-kegiatan khusus dapat dibentuk sesuai dengan keperluan, yang disebut kelompok khusus (POKSUS) tanpa menambah pokja baru, berbeda dalam lingkungan sekretaris umum/pokja-pokja yang bersangkutan.

## 2.3 Pemberdayaan

### 2.3.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan. Pemberdayaan berarti upaya untuk memperoleh kekuatan. Konsep pemberdayaan di Indonesia ini mengadopsi dari bahasa Inggris yaitu dari kata *empowermen*. Konsep ini lahir dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Eropa yang muncul pada dekade 70-an yang berkembang terus hingga saat ini. Secara historis, *empowerment* pada masyarakat Eropa modern merupakan aksi emansipasi pada liberasi manusia dari totaliterisme keagamaan. Emansipasi dan

liberalisasi serta penataan terhadap segala kekuasaan dan penguasaan inilah yang kemudian menjadi substansi dari pemberdayaan.

Saumel Paul dalam (Widiastuti, dkk 2015: 12), mengatakan bahwa pemberdayaan berarti "pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan." Konsep pemberdayaan yang ditawarkan oleh Sumodiningrat dalam (Widiastuti, dkk 2015: 12), dilihat dari tiga sisi. Pertama, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang. Kedua, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk menguatkan diri dari dalam terhadap segala bentuk penindasan. Menurut Prijono dan Pranarka dalam (Widiastuti, dkk 2015:13), pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni:

- a. mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.
- b. melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.

Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Sehingga pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Hal itu diperkuat dengan pendapat Moh Ali Azis dalam (Widiastuti, 2015:13), menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang seharusnya dilalui dalam melakukan pemberdayaan. Pertama, membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya. Kedua, melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut secara mandiri. Ketiga, menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih tiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. Keempat, mencari cara penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat. Kelima, melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Keenam, mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.

Pemberdayaan adalah pilihan, kebebasan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, martabat, penghargaan, kerjasama dan rasa saling memiliki pada komunitas. Jo Rowldan dalam (Widiastuti, 2015: 15) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah proses di mana individu, organisasi atau kelompok yang dalam kondisi tidak berdaya (*powerless*) menjadi sadar dan tahu (*having knowledge*) akan dinamika kekuasaan yang bekerja dalam konteks kehidupan mereka, menjalankan (*exercise*) kontrol tanpa mengganggu hak-hak orang lain dan mendukung upaya pemberdayaan (individu atau kelompok) lain dalam masyarakat.

Pemberdayaan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan riilnya, dengan usaha dan kemampuan



masyarakat sendiri, melalui indikator ekonomi, sosial dan budaya (Sa'adah, 2014 dalam Widiastuti, 2015: 39). Maharani (2012) dalam Widiastuti (2015: 39), menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan yang berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan individu-individu dan kelompok-kelompok orang melalui kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Kapasitas tersebut seringkali berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok-kelompok sosial besar yang bekerja berdasarkan agenda bersama.

Pernyataan Suharto (2010) dalam Widiastuti (2015: 39), pemberdayaan pada intinya adalah memampukan seseorang menjadi lebih maju dan mandiri, dalam arti lain memampukan seseorang untuk menjasi sejahtera. Sejahtera secara lahir berarti mendapatkan kesempatan dan kemampuan (*capability*) untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai seorang manusia, misalnya terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang, mendapatkan pendidikan dasar yang memadai dan

kesehatan. Sejahtera secara batin adalah menjadi bahagia, bebas dari rasa takut, bebas dari ancaman, bebas mengemukakan pendapat dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Ketika masyarakat sudah sejahtera, pemberdayaan sudah dianggap berhasil karena masyarakat yang sudah sejahtera akan mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan), mampu mengarahkan dirinya sendiri, memiliki kekuatan untuk berunding, memiliki *bergaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dan bertanggungjawab atas tindakannya.

Berdasarkan pendapat para ahli, pemberdayaan adalah serangkaian proses secara bertahap masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia di lingkungan sekitarnya, dengan cara pemberian motivasi, energi, pengetahuan dan keterampilan agar masyarakat menjadi lebih mandiri dan mampu untuk mengelola potensi tersebut, sehingga dapat mensejahterakan hidup masyarakat itu sendiri.

### **2.3.2 Tujuan Pemberdayaan**

Menurut Suharto (2010: 60) tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuatan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal maupun eksternal, sedangkan pendapat yang sama dalam (Sulistiyani 2004: 80) dan (Fakhrudin dkk: 2010: 1) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian

tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan suatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, psikomotorik, konatif, afektif, dengan penguasaan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Menjadi mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, psikomotorik dan afektif, serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material (Suryana, 2010: 19).

Menurut Gunawan (2014: 143) dalam penelitiannya tentang pemberdayaan usaha kecil menengah melalui penerapan teknologi tepat guna, mampu meningkatkan usaha secara ekonomi. Omset produk berbagai macam dompet, sebelum penerapan TTG dalam 1 bulan rata-rata memproduksi 2.700 buah, jadi omset 2.700 dikali Rp 8.000,- sama dengan 21.600.000,-/bulan, kuantitas produk berbagai macam dompet sesudah penerapan TTG rata-rata memproduksi 3.300 buah, jadi omset 3.300 dikali Rp 8.000,- sama dengan Rp 26.400.000,-.

### 2.3.3 Strategi Pemberdayaan

Menurut Suharto (2010: 66), konteks pekerjaan pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga cara, Aras Mikro, Aras Mezzo dan Aras Makro.

- a. Aras Mikro, yaitu pemberdayaan dilakukan kepada klien secara individu melalui bimbingan konseling, *stress managemen*, *crisis intervention*. Tujuan utama adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
- b. Aras Mezzo, yaitu pemberdayaan yang dilakukan terhadap kelompok klien dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya dilakukan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi.
- c. Aras Makro, yaitu disebut juga pendekatan sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, dengan tujuan memandang klien yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Hal ini sependapat dengan Guitierrez dalam jurnal internasional mengatakan bahwa:

*“Guitierrez (2015) argues that there are three perspectives on empowerment. First, a macro level perspectives defines empowerment as the process of increasing collective political power. Second, a micro level perspektive defines empowerment as the development of an individual feeling of increased power or control without an actual change in structural arrangements.*

*Third, an approach combining the first and second perspectives: how individual empowerment can contribute to group empowerment and how the increase in a group' power and enhance the functioning of this individual member" (Gutierrez, 2015: 210))".*

Dapat diartikan sebagai berikut: Guitierrez (2015: 210) berpendapat bahwa ada tiga perspektif pemberdayaan. Pertama, perspektif tingkat makro mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses peningkatan kekuatan politik kolektif. Kedua, perspektif tingkat mikro mendefinisikan pemberdayaan sebagai pengembangan perasaan individu daya yang meningkat atau kontrol tanpa perubahan yang sebenarnya dalam pengaturan struktural. Ketiga, pendekatan yang menggabungkan perspektif pertama dan kedua, "bagaimana pemberdayaan individu dapat berkontribusi untuk pemberdayaan kelompok dan bagaimana peningkatan kekuatan kelompok dapat meningkatkan fungsi anggota individu"

Selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat, menurut (Fakhrudin dkk, 2010: 6) memiliki banyak komponen yaitu, (1) pengorganisir dari luar (2) pemimpin lokal, (3) koalisi organisasi warga masyarakat, (4) prosedur demokrasi, (5) struktur yang dapat diterima oleh semua pihak, (6) taktik yang didasarkan pada konfrontasi dan kepentingan diri.

#### **2.3.4 Pendekatan Pemberdayaan**

Menurut (Fakhrudin dkk, 2010: 04) ada tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) pelayanan sosial dan koordinasi pelayanan, (2) pembangunan lokal, dan (3) tindakan sosial. Proses pembangunan lokal pada dasarnya adalah memungkinkan masyarakat untuk memecahkan masalah secara

kooperatif dan kesadaran diri. Selanjutnya pendekatan pemberdayaan dalam penerapannya disingkat 5P menurut Suharto (2010: 67) yaitu meliputi: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

- a. Pemungkinan, artinya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan menumbuhkan kembangkan kemampuan masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan, artinya melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antar yang kuat dan yang lemah. Pemberdayaan tidak mengenal kaum yang lemah ataupun kuat dan tidak terdapat suatu dominasi yang tidak menguntungkan bagi rakyat kecil.
- d. Penyokong, artinya memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan dapat menyokong masyarakat agar tidak terjatuh dalam lubang kemiskinan.
- e. Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan dapat selaras dan seimbang yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

### 2.3.5 Model Pemberdayaan

Menurut Fakhruddin dkk, (2010: 17-19), beberapa cara pandang mengenai model pemberdayaan adalah, sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan dimaknai dalam konteks penempatan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung dalam pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek yang berbuat secara mandiri.
- b. Pemberdayaan secara prinsipil berurusan dengan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyak orang beragumen bahwa masyarakat akar rumput sebenarnya tidak membutuhkan hal-hal yang utopis seperti demokrasi, desentralisasi, *good gavernance*, otonomi daerah, masyarakat sipil.
- c. Pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. Berdasarkan sisi proses masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar, dan meraih kedaulatan.
- d. Pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif.

Selanjutnya menurut (Sulistiyani, 2004: 114-121) pemberdayaan organisasi non pemerintah sebagai agen pembaharu bertolak dari *capacity building*. Model pemberdayaan yang dilakukan menyangkut kelembagaan, yang meliputi efisiensi struktur, fungsi, gaya kepemimpinan yang visioner, adanya diskresi dalam

pengambilan keputusan, fungsionalisasi hubungan dan komunikasi interaktif dalam suatu kaitan dengan *cross departmental*.

Output pemberdayaan pada level I ini, yaitu berpijak pada permasalahan kelembagaan adalah berupa organisasi agen pembaharu yang establish. Jika agen pembaharu memiliki organisasi berstatus establish, maka telah berhak “bermitra” untuk memberikan input atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Level II, pemberdayaan diarahkan pada kemampuan manajerial. Kemampuan manajemen meliputi kemampuan dalam memiliki fungsi-fungsi manajemen. Menurut Garson dan Overman orientasi manajemen adalah NPM (*New Public Manajement*) dalam organisasi diarahkan pada fungsi PAFHIER yaitu meliputi *Policy analysis, Finance, Human Relations, Information, External Relations*. Output dari proses pemberdayaan demikian adalah berupa sistem manajemen organisasi agen pembaharu yang efisien. Penguatan kemampuan manajemen berkenaan dengan konteks pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan-pedesaan hendaknya mencakup peningkatan kemampuan untuk mengenali, memahami dan menganalisis kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kemiskinan, sehingga dapat menjembatani proses pemberdayaan yang tepat.

Kemampuan manajemen keuangan agen pembaharu yang efisien sehingga mampu memanfaatkan dana untuk pemberdayaan masyarakat miskin dengan tepat sasaran dan akuntabel. Mampu mengembangkan pola hubungan kemanusiaan dalam organisasi secara internal, sehingga terbentuk iklim kerja yang sehat yang



cukup kondusif untuk melahirkan pemikiran cemerlang dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Mampu mengakses informasi secara komprehensif sehubungan dengan pemberdayaan masyarakat miskin, mengolah data, mendokumentasikan dan menyajikan data untuk keperluan pemberdayaan masyarakat miskin tersebut. Mampu membentuk jaringan kerja dengan pihak luar yang memiliki kompetensi dalam masalah pemberdayaan masyarakat miskin.

Tahap III, agen pembaharu harus ditingkatkan kemampuannya sampai pada kinerja yang baik. Jika agen pembaharu sudah sampai tingkat keberdayaan demikian, yang dinyatakan melalui indikator efisien, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan yang baik, maka sudah mencapai agen pembaharu yang dapat dipercaya untuk diajak bermitra dalam advokasi program pemberdayaan masyarakat.

Level VI, agen pembaharu ditingkatkan untuk dapat menjadi agen yang profesional yang artinya mampu menguasai substansi permasalahan pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya, dengan memperhitungkan kasus-kasus, mampu melakukan pendekatan yang tepat, dengan menawarkan program ekonomi produktif yang sesungguhnya, sehingga mampu mengantarkan masyarakat untuk mandiri. Indikator yang dipergunakan untuk mengukur tingkat keberdayaan agen pembaharu pada tingkat IV, yaitu sebagai agen pembaharu yang profesional adalah penguasaan substansi permasalahan kemiskinan, penguasaan konsep dan implementasi substansi permasalahan kemiskinan, penguasaan konsep dan implementasi tri day (daya manusia, daya lingkungan dan ekonomi).

### 2.3.6 Tahap-tahap Pemberdayaan

Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat harus melalui beberapa tahap, yaitu :

- a. Penyelesaian, yaitu tahap penyelesaian dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Tahap ini menggambarkan bahwa pihak pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, agar dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan efektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyelesaian akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik (Sulistiyani, 2004: 83).
- b. Transformasi, yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan mengalami proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan, (Sulistiyani, 2004: 83-84).

- c. Pengayaan, yaitu tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan keterampilan yang diperlukan, agar mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini, maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Konsep pembangunan masyarakat menggambarkan bahwa pada kondisi seperti ini seringkali didudukkan pada subyek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja (Sulistiyani, 2004: 84).

### **2.3.7 Proses Pemberdayaan**

Menurut Bradfield (1966) dalam (Mardikanto, 2012: 254), yang menawarkan siklus, terdiri dari sepuluh tahapan proses kegiatan pemberdayaan, yaitu: (1) pengumpulan data keadaan, (2) analisis data keadaan, (3) identifikasi masalah, (4) pemilihan masalah yang dipecahkan, (5) tujuan program, (6) pemecahan masalah, (7) rencana kegiatan, (8) pelaksanaan kegiatan, (9) evaluasi kegiatan, (10) hasil yang dicapai.

#### **a. Pengumpulan Data Keadaan/Identifikasi Potensi**

Pengumpulan data keadaan, merupakan kegiatan pengumpulan data dasar (*data base*) yang diperlukan untuk menentukan masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan atau kegiatan yang akan direncanakan. Pengumpulan data keadaan dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang kemudian dilengkapi dengan kegiatan

survey mandiri yaitu serangkaian kegiatan pengumpulan data, wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama fasilitatornya (Mardikanto, 2012: 254-255). Data yang dikumpulkan mencakup: (1) keadaan sumber daya, yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana prasarana, (2) teknologi yang digunakan, baik yang menyangkut: bahan, alat/perlengkapan, teknik atau cara-cara, maupun “*rekayasa sosial*” yang sudah diterapkan, (3) peraturan.

b. Analisis data keadaan

Maksud dari analisis data keadaan ialah, kegiatan penilaian keadaan yang dalam praktik dilakukan melalui kegiatan PRA yang mencakup : (1) analisis tentang diskripsi data keadaan, (2) penilaian atas keadaan sumber daya, teknologi dan peraturan yang ada, (3) pengelompokan data keadaan kedalam, (a) data aktual dan data potensial, (b) keadaan yang ingin dicapai dan yang sudah tercapai (c) teknologi yang dapat dikembangkan dan yang sudah digunakan, (d) peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan yang dapat diberlakukan.

c. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah, merupakan upaya untuk merumuskan hal-hal yang tidak dikehendaki atau faktor-faktor menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki (Mardikanto, 2012: 256). Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan menganalisis kesenjangan: (1) antara data potensial dengan data aktual, (2) antara keadaan yang ingin dicapai dengan yang sudah dicapai, (3) antara teknologi yang seharusnya digunakan dengan yang sudah diterapkan, (4) antara peraturan yang

harus dilakukan dengan praktik atau kenyataan yang dijumpai dalam penerapan peraturan-peraturan tersebut.

d. Pemilihan Masalah yang akan Dipecahkan

Pada umumnya, dapat dibedakan adanya masalah-masalah umum dan masalah khusus. Masalah umum, adalah masalah yang melibatkan banyak pihak (sektor), dan pemecahannya tidak memerlukan selang waktu yang lama. Meskipun demikian, baik masalah umum maupun masalah khusus harus diupayakan pemecahannya. Berkaitan dengan hal ini, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat adalah: (1) pemilihan pemecahan masalah yang benar-benar menyangkut kebutuhan nyata (*real-need*) yang sudah dirasakan masyarakat, (2) pemilihan pemecahan masalah yang segera harus diupayakan, (3) pemilihan pemecahan masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan banyak hal, yang harus ditangani bersama-sama oleh banyak pihak secara terpadu, serta memiliki pengaruh yang besar demi keberhasilan pembangunan dan pembangunan masyarakat pada umumnya, (4) lebih lanjut, dalam pemilihan masalah yang ingin dipecahkan, perlu dilakukan analisis terhadap “*impact point*”, yaitu ; masalah-masalah strategis yang relative mudah dilaksanakan dengan biaya sumber daya yang relatif murah, tetapi mampu memberikan manfaat yang sangat besar ditinjau dari perubahan perilaku, peningkatan produktivitas, dan perbaikan pendapatan serta mutu hidup masyarakat.

e. Perumusan Tujuan

Berdasarkan hasil penelitian masalah yang akan dipecahkan, tahapan berikut yang harus dilaksanakan adalah perumusan tujuan atau penerima manfaat

yang hendak dicapai. Pada perumusan tujuan seperti ini, perlu diperhatikan agar penerima manfaat yang hendak dicapai haruslah *realistis*, baik ditinjau dari kemampuan sumber daya (biaya, jumlah dan kualitas tenaga) maupun dapat memecahkan semua permasalahan sampai tuntas, tetapi dapat dirumuskan secara bertahap dengan target-target yang *realistis*. Seperti halnya dalam analisis data keadaan, perumusan tujuan sejauh mungkin juga dinyatakan secara kuantitatif. Hal ini sangat penting, agar kemudahan perumusan rencana evaluasi yang akan dilakukan (Mardikanto, 2012: 258).

f. Alternatif Pemecahan Masalah

Setiap masalah, pada hakekatnya dapat dipecahkan melalui beberapa alternatif yang dapat dilakukan, yang masing-masing menuntut kondisi yang berbeda-beda, baik yang menyangkut besarnya dana, jumlah dan kualitas tenaga yang dipersiapkan, peraturan-peraturan yang harus diadakan, serta batas waktu yang diperlukan, sehubungan dengan itu, setiap fasilitator seharusnya selalu berfikir *realistis* sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, perumusan tujuan seharusnya tidak dilandasi oleh pemikiran untuk mencapai penerima manfaat yang terbaik yang diinginkan, tetapi sekedar yang terbaik yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sumber daya, dengan dukungan teknologi, peraturan dan waktu yang tersedia (Mardikanto, 2012: 258-259).

g. Hasil yang Dicapai

Hasil akhir atau output setelah serangkaian proses pemberdayaan dilakukan akan mencapai kompetensi sebagai agen pembaharu yang berdaya dan mampu mengimplementasikan pendampingan kepada masyarakat untuk melakukan

program aksi dari perancangan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat (Sulistiyani, 2004: 117). Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh warga belajar setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2000: 50). Hasil yang dicapai berupa angka atau nilai yang diperoleh dari tes hasil belajar. Tes hasil belajar dibuat untuk menentukan tingkat pengetahuan dan keterampilan penguasaan materi. Penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi perkembangan seorang siswa atau warga belajar dalam belajar sehingga instruktur dapat memperbaiki dan menyusun kembali kegiatan pembelajaran baik untuk keseluruhan kelas maupun individu.

Bloom (dalam Sudjana 2000: 50-55) menjelaskan bahwa hasil belajar diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu: (1) hasil belajar kognitif, berkenaan dengan kemampuan intelektual yang terdiri dari: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi, (2) hasil belajar afektif, berkenaan dengan sikap dan minat yang terdiri dari: penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi, (3) hasil belajar psikomotorik, mencakup keterampilan fisik (motorik) dan kemampuan bertindak yang terdiri dari: gerak reflek dan keterampilan gerakan.

### **2.3.8 Hambatan Pemberdayaan**

Menurut Arsiyah (2009: 374) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal antara lain: (1) terbatasnya sumber daya manusia, (2) tidak tersedianya bahan baku, (3) keterbatasan kemampuan manajerial, (4) tidak adanya kemampuan mengelola

peluang pasar yang ada dan terbatasnya modal usaha yang dimiliki. Sedangkan hambatan eksternal antara lain: (1) Akses kelompok usaha bersama (KUB) sebagai mitra pemerintah sebagai jembatan pemerintah dengan pengusaha kurang optimal, (2) belum ada pihak swasta yang memberikan bantuan modal sebagai usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut Mu'arifuddin (2011: 117-119) dalam penelitiannya tentang pemberdayaan masyarakat dikelompok tani JIO meliputi beberapa bidang: (1) bidang permodalan, ini disebabkan tingkat sumber daya manusia yang rendah dalam hal pengadministrasian modal, (2) bidang produksi, meliputi kepemilikan lahan yang sempit, iklim yang tidak mendukung, kurangnya pengetahuan pemahaman akan jenis lokasi pertanaman anggrek, kurangnya motivasi perawatan anggrek, dan hasil produksi yang rendah, (3) bidang pemasaran, yaitu terjadinya kebergantungan dengan kelompok lain.

Menurut Almasri dan Deswimar (2011: 49) dalam artikelnya tentang “peran program pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan” mengemukakan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain: (1) Kecilnya modal, (2) rendahnya penguasaan teknologi, (3) sempitnya peluang dan kesempatan kerja, (4) terbatasnya pengembangan sumber daya manusia dan tidak dikuasanya akses pasar.



## 2.4 Kelompok Wanita Tani

### 2.4.1 Pengertian Kelompok

Kelompok adalah sesuatu yang alami, karena manusia sebagai makhluk sosial akan berinteraksi satu dengan yang lain sehingga membentuk kelompok-kelompok tertentu. Johson (2012) dalam Zulkarnain (2013: 2), menjabarkan tujuh definisi yang paling umum tentang kelompok, antara lain: (1) tujuan, (2) ketergantungan, (3) interaksi antar individu, (4) persepsi keanggotaan, (5) hubungan terstruktur, (6) motivasi dan (7) pengaruh yang menguntungkan. Sprott (dalam Santoso, 2004: 6), memberikan pengertian kelompok sebagai beberapa orang yang bergaul satu dengan yang lain. Smith (dalam Santoso, 2004: 6), kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu, yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dan atas dasar kesatuan resepsi.

Menurut Kenneth (1988) dalam Sugiyarta (2009: 5), kelompok adalah kumpulan orang-orang yang berinteraksi satu sama lain secara teratur dalam suatu periode waktu serta menganggap diri mereka saling bergantung dalam kaitannya dengan pencapaian satu tujuan bersama atau lebih. Berdasarkan pendapat para ahli, definisi kelompok yaitu interaksi antara individu yang satu dengan individu lainnya yang saling ketergantungan untuk mencapai tujuan yang sama.

## 2.4.2 Pengertian Kelompok Wanita Tani

Kegiatan kelompok tani merupakan perkumpulan yang beranggotakan para petani perempuan desa. Ketua kelompok tani dipilih dari salah seorang petani yang dianggap memiliki pengetahuan dan wawasan luas. Ketua kelompok tani yang terpilih diharapkan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya antara lain mengkoordinasikan kegiatan gotong-royong untuk pengolahan lahan anggota kelompok tani secara bergantian, mengkoordinasikan penjualan hasil produksi dan melakukan hubungan dengan pihak penyuluh maupun dinas pertanian. Kelompok tani sebagai wadah organisasi dan bekerja sama antar anggota mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tani, sebab segala kegiatan dan permasalahan dalam berusaha tani dilaksanakan oleh kelompok secara bersamaan.

Adanya kelompok tani, para petani dapat bersama-sama memecahkan permasalahan yang antara lain berupa pemenuhan sarana produksi pertanian, teknis produksi dan pemasaran hasil. Kelompok tani sebagai kumpulan para petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya (Departemen Pertanian RI 1997 dalam Samsi 2011: 15). Fungsi utama kelompok tani pada dasarnya adalah sebagai wahana dalam proses belajar-mengajar, wahana bekerjasama, dan wahana berproduksi. Apabila ketiga fungsi tersebut telah berjalan baik, maka diarahkan untuk menjadi kelompok usaha.

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kelompok Wanita Tani (KWT) adalah kumpulan para wanita yang mempunyai aktivitas di

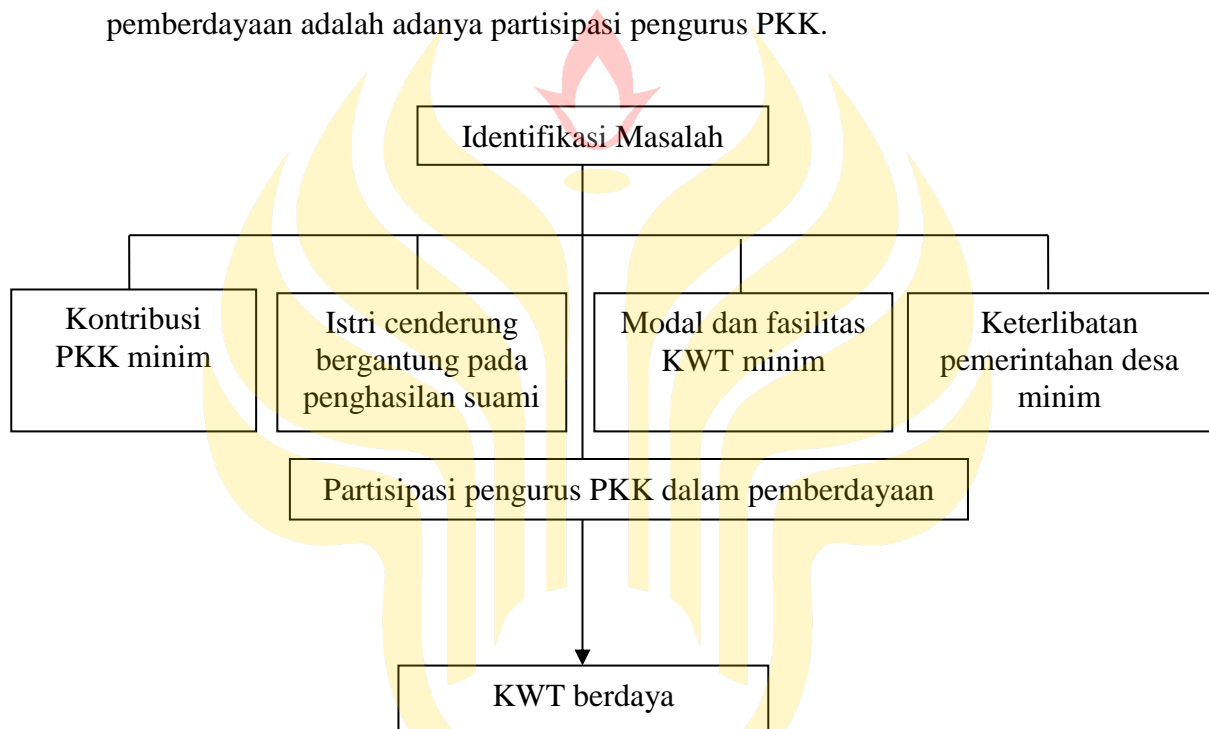
bidang pertanian yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya. Departemen Pertanian menetapkan bahwa kelompok tani memiliki tiga fungsi utama (Martins, 1997 dalam Hariadi, 2011: 54) yakni: (a) sebagai unit belajar, adalah kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera, (b) unit kerjasama, kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama di antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain, melalui kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, dan (c) unit produksi, usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

## 2.5 Kerangka Berfikir

Berdasarkan hasil penelitian, Kelurahan Plalangan memiliki lebih dari 50% masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, baik petani pemilik lahan maupun buruh tani. Akan tetapi ibu-ibu rumah tangga yang bergabung di KWT masih minim, mereka cenderung sibuk dengan aktivitasnya masing-masing yang hanya sebatas mengurus rumah tangganya sendiri. Terbatasnya jumlah KWT pada organisasi ini belum mampu mengembangkan usahanya secara optimal, dibandingkan dengan program-program PKK yang lainnya. Masih banyak orang-orang di Kelurahan Plalangan yang menganggap perempuan tidak mampu memberikan kontribusi terhadap program pemberdayaan. Ia hanya mengandalkan penghasilan suami secara ekonomi. Sehingga keterlibatan pengurus PKK terhadap KWT masih minim. Peran serta perangkat desa juga masih rendah.

Modal dan fasilitas yang dimiliki oleh KWT juga masih terbatas. KWT yang di bawah binaan PKK terdapat 2 kelompok, yakni KWT Sri Rejeki dan Bunda Lestari. Masing-masing kelompok terdiri dari 7 orang, maka total semuanya ada 14 orang. Pengelolaan lahan pertanian maupun perkebunan oleh masyarakat dirasa masih kurang maksimal, hal tersebut dilihat dari perolehan hasil pertanian yang kurang maksimal dan belum dapat memenuhi perekonomian masyarakat. Produk yang dihasilkan oleh KWT hanya sebatas tanaman saja tanpa adanya produksi yang mampu memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan adanya program pemberdayaan yang dapat membantu KWT untuk meningkatkan hasil pertanian sehingga akan berdampak pada peningkatan penghasilan yang diperoleh masyarakat. Program pemberdayaan yang ada di Kelurahan Plalangan

ialah program pemberdayaan Kelompok Wanita Tani, program tersebut berfungsi untuk memanfaatkan hasil pertanian masyarakat agar dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis dan dapat membantu meningkatkan pertanian warga masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan adalah adanya partisipasi pengurus PKK.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh melalui data hasil penelitian tentang partisipasi pengurus PKK dalam pemberdayaan KWT, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

##### **5.1.1 Partisipasi Pengurus PKK dalam Pemberdayaan KWT**

Pemberdayaan KWT melibatkan berbagai pihak antara lain, Camat, Koramil, aparat desa, pengurus PKK dan pengurus KWT. Partisipasi pengurus PKK dalam pemberdayaan KWT dilakukan pada tiga tahap yang terdiri dari tahap penyadaran, tahap transformasi dan tahap pengayaan. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh pengurus PKK terdiri dari ide, tenaga dan barang. Bentuk ide diwujudkan melalui musyawarah bersama, bentuk tenaga diwujudkan melalui kehadiran pengurus PKK dalam penyampaian teori dan mengikuti praktek dalam pelatihan pembuatan bibit buah-buahan. Bentuk barang diwujudkan dengan menyumbangkan benih buah-buahan dan polybag.

##### **5.1.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pemberdayaan KWT**

Faktor penghambat partisipasi pengurus PKK dalam pemberdayaan KWT adalah waktu, usia dan pekerjaan. Sedangkan penghambat pemberdayaan KWT itu sendiri adalah tutor, tingkat kesadaran rendah, tingkat partisipasi pengurus PKK maupun aparat desa minim, anggota pasif, tutor kurang variatif ketika menyampaikan materi, anggaran dana minim, sarana prasarana yang belum

memadai, cuaca yang tidak mendukung, evaluasi tidak totalitas. Sedangkan faktor pendukungnya adalah pengurus KWT aktif, aparat desa selalu memberikan motivasi kepada pengurus PKK beserta segenap KWT agar bersama-sama mengembangkan KWT menjadi lebih baik. Kemudian pendukung bagi program pemberdayaan KWT itu sendiri ialah lahan yang luas, sumbangan material dari berbagai pihak, antara lain: (1) BLH, berupa pupuk 50 kg, (2) PKK, berupa benih dan polybag, (3) PT Sidomuncul, berupa tong biru, (4) aparat desa, berupa sekop, kaleng bekas, bambu, alat biopori, alat perajang dan composting.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut.

- 5.2.1 Partisipasi pengurus PKK dalam pemberdayaan KWT perlu ditingkatkan, agar program dapat berkembang secara berkelanjutan. Keterlibatan aparat desa dan masyarakat setempat harus bersinergi memajukan KWT.
- 5.2.2 Program pemberdayaan KWT melalui pembuatan bibit buah-buahan harus dipertahankan, sebagai program baru bagi KWT sebab mampu meningkatkan pendapatan bagi KWT.

## DAFTAR PUSTAKA

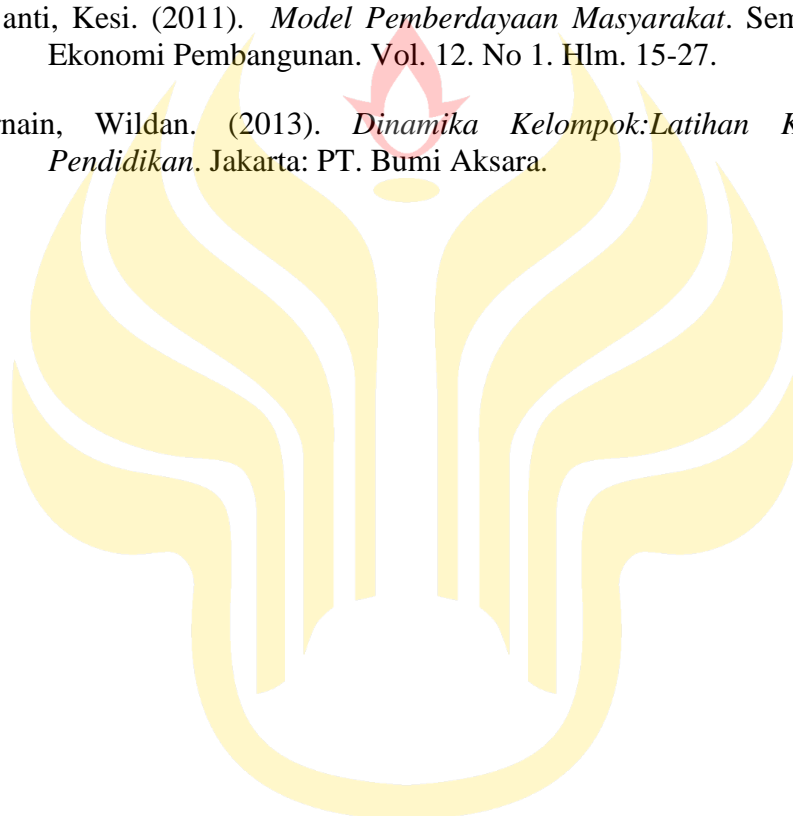
- Adi, Isbandi Rukminto. (2001). *Pemberdayaan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi VI.
- \_\_\_\_\_. (2001). *Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.
- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afifatur, Rizqi. (2011). *Resume Jurnal Internasional*. (Online). (<http://afifaturrizqi.blogspot.com/2011/12/resume-jurnal-internasional.html>) diakses pada tanggal 20 April 2017 pukul 15.49 WIB.
- Agus, Ragil. (2011). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.
- Anonim. (2006). *Empowerment and Urban Poverty Alleviation in Indonesia*. (Online). (<http://wordpress.com/2006/11/20/empowerment-and-urban-poverty-alleviation-in-indonesia/>).<sup>Diakses</sup>, selasa, 31/01/2017 pukul 15:34 WIB.
- Anonim. *Artikel*. (Online). (<http://link.springer.com/article/10.1007/BF01866417>) Diakses sabtu, 28/01/2017 pukul 20.05 WIB.
- Anonim. *Pemerintahan Kecamatan Gunungpati Semarang*. (Online). (<http://semarang.go.id/pemerintahan/kecamatan/kecamatan-gunungpati-semarang.html>). Diakses sabtu, 28/01/2017 pukul 20.05 WIB.
- Anwas, Oos. M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arsiyah. (2009). *Pemberdayaan dalam Pembangunan Ekonomi Desa*. *Jurnal Wacana* Vol. 12 (2).
- Boley, B.B. (2014). *Measuring empowerment: Developing and validating the Resident Empowerment through Tourism Scale (RETS)*” *jurnal Tourism Managemen*. Vol 45 (85-94).
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif (Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



- Edi, Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Rafika Aditama.
- Fakhrudin dkk. (2010). *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat Desa di Profinsi Jawa Tengah*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Firmansyah. (2009). *Membangun Desa Terpadu Berbasis Masyarakat Partisipatif*. Jakarta: Agromedia Pustaka.
- Hamalik, Oemar. ( 2001). *Media Pendidikan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamdani. 2011. *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Hamzah, Uno. (2008). *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hikmat, Herry. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Huraerah, Abu. (2011). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Anggota IKAPI.
- Karianga, Hendra. (2011). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Perspektif Hukum dan Demokrasi*. Bandung: PT. Alumni.
- Kogoya, dkk. (2015). *Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa di Kabupaten Lanny Jaya Papua*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 15, no. 2.
- Kriyantono, Rahmad. (2009). *Teknis Praktis, Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kusnadi. (2005). *Studi tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Lily Publisher.
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mu'arifuddin. (2011). *Pemberdayaan Petani Anggrek Melalui Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan Di Kelompok Tani Anggrek Jrobang Indah Orchid Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang*. Semarang: Skripsi.
- Nurhalim, Khomsun. (2014). *Strategi Pembelajaran Pendidikan Non Formal*. FIP UNNES Press.

- Raharjo, Bambang. (2009). *Rekayasa Jurnal Penerapan Teknologi dan Pembelajaran* : LPKM UNNES vol. 6 No. 2 oktober 2009.
- Rifa'i, Achmad. (2003). *Desain Sistematis Pembelajaran Orang Dewasa*. UNNES Press.
- Santosa, Slamet. (2004). *Dinamika Kelompok*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sardiman. (2004). *Pelatihan Berbasis Kompetensi (Competency Based Training)*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Sholeh, Chabib. (2014). *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia.
- Soetomo. (2009). *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sudjana, Nana. (2000). *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Algensindo.
- Sugandi, Akhmad. (2004). *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi*. Jakarta :PT. Grasindo.
- Sugiyarta. (2009). *Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan*. Semarang: Unnes Press.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartini, dkk. (2009). *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: PT Lkis Cemerlang Printing.
- Suharto, Edi. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Grava Media.
- Suprijanto. (2005). *Pendidikan Orang Dewasa dari Teori hingga Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryana, Sawa. (2010). *Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: Unnes Press.

- Sutedjo. (2006). *Langkah-langkah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)*, Jakarta : Azka Press.
- Sutrisno. (2010). *Merancang Pembangunan Modern*. Bandung: PT. Alumni.
- Widiastuti, dkk. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Widjajanti, Kesi. (2011). *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 12. No 1. Hlm. 15-27.
- Zulkarnain, Wildan. (2013). *Dinamika Kelompok:Latihan Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG